

ADVOKASI GERAKAN PEREMPUAN
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER
DI FINLANDIA
STUDI KASUS: 2000-2012
*(THE ADVOCACY OF WOMEN MOVEMENT
ON CREATING GENDER EQUITY
IN FINLAND, CASE STUDY: 2000-2012)*

GALUH OCTANIA PERMATASARI

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Email: galuh_octaniia@yahoo.com

Abstract

This research aims to describe the advocacy process of women movement on creating gender equity in Finland. As one of the welfare states in the world and the first European country where women gained the full political rights, Finland proved that gender equity policies that implemented in the country cannot be separated from the efforts of women movement that emerged since the era before independence and continuously participate to support the voice of women until the 21st century. The process of advocacies start from the base-work by creating and grouping the women movement; secondly, by collecting support from the international actor such as women movement in Europe; and lastly, the front-line work by submitting the applications regarding all the gender inequity issues that happened in Finland. Furthermore, the data on this research is secondary data from books, website, and other sources. The author, by conducting this study, is also using the qualitative analysis techniques.

Keywords: advocacy, women movement, Finland, gender equity

PENDAHULUAN

Dunia internasional dewasa ini menjadi semakin dinamis. Diantara isu-isu baru yang bermunculan, salah satu isu yang paling menarik keperhatian masyarakat dunia adalah isu mengenai keadilan gender. Emansipasi perempuan merupakan hal yang diserukan oleh berbagai kaum perempuan di dunia. Keprihatinan kaum perempuan muncul ketika mereka diperlakukan tidak adil seperti laki-laki yang ada di negara mereka.

Keadilan gender pada hakikatnya masih menjadi hal yang kurang diperhatikan, khususnya oleh negara. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada negara di dunia yang tidak menjunjung keadilan gender. Diantara negara-negara di dunia, Finlandia merupakan salah satu negara dengan tingkat keadilan gender yang sangat baik (BBC, 2015). Tergabung dalam salah satu negara Nordik, Finlandia membuktikan bahwa keadilan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan sejak lama. Berdasarkan laporan dari *World Economic Forum*, Finlandia bahkan menempati peringkat 3 terbaik sebagai negara yang menjunjung keadilan gender (Haines, 2016).

Pada saat yang sama, sebenarnya di Finlandia sendiri pernah mengalami pemisahan gender yang begitu besar dimana laki-laki begitu mendominasi terhadap perempuan. Tingkat kekerasan perempuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki di Finlandia juga pernah terjadi (Hearn & Niemi, 2011). Tidak hanya tentang ketidakadilan dalam hal kekerasan, ketidakadilan juga terjadi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Ketidakadilan ini bahkan tidak hanya berlangsung dalam proses meraih kemerdekaan, akan tetapi juga masih berlanjut setelah kemerdekaan. Seperti misalnya, dalam masalah upah/gaji, sepanjang tahun 1990an, perempuan Finlandia mengalami diskriminasi karena gaji yang diterima tidak sesuai dan tidak sama dengan laki-laki, padahal keduanya melakukan pekerjaan dengan nilai yang sama (EU, 2002). Dalam bidang politik, pada masa sebelum kemerdekaan, kuota perempuan di parlemen bahkan tidak ada dan semua masih menjadi dominasi kaum laki-laki.

Pemisahan gender yang terjadi begitu memprihatinkan sehingga mendorong gerakan-gerakan perempuan di Finlandia untuk menyuarakan emansipasi wanita. Gerakan-gerakan perempuan yang ada di Finlandia saling berkerjasama dan melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Gerakan-gerakan perempuan yang ada di Finlandia diantaranya adalah *Suomen Naisyhdistys (Women's Society of Finland)* yang terbentuk pada tahun 1884, *The Lotta Svard, Unioni Naisasialiitto (Feminism League)*, *The Group 9*, dan *Marttaliitto (The Martha Organisation)*.

Seluruh gerakan perempuan ini menjadikan hak pilih (*women suffrage*) sebagai tuntutan. Sejak itu, advokasi gerakan-gerakan perempuan di Finlandia menjadi didengar dan menjadikan banyak wakil perempuan terpilih di parlemen. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan gerakan-gerakan perempuan di Eropa yang tergabung dalam *Transnational Advocacy Network (TANs)*. Dalam perkembangannya, advokasi gerakan-gerakan perempuan ini sedikit banyak menjadikan Finlandia sebagai negara yang memperhatikan keadilan gender.

Gerakan-gerakan perempuan ini kemudian berkoalisi menjadi satu payung di bawah *Coalition of Finnish Women's Associations* yang terbentuk pada tahun 1987 (Sinkkonen, 2007). Perjuangan perempuan Finlandia sejatinya sudah mulai berkembang sejak akhir tahun 1990-an dan meningkat pesat pada tahun 2000-an seiring dengan perkembangan sistem *Welfare State* negara-negara Nordik, termasuk Finlandia (Hannele Kurki, Kuusi, & Vänskä, 2001).

Seiring waktu, advokasi yang dilakukan gerakan-gerakan perempuan berimbas pada peningkatan partisipasi perempuan yang tinggi dalam kehidupan publiknya, di mana Finlandia termasuk salah satu negara yang sudah pernah memiliki presiden perempuan dan memiliki badan khusus gender di pemerintahan. Advokasi para gerakan perempuan juga berimbas kepada kebijakan negara sebagai implikasi perwujudan keadilan gender.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana langkah-langkah advokasi gerakan perempuan Finlandia dalam mewujudkan keadilan gender di negaranya?

PEMBAHASAN

GERAKAN PEREMPUAN DI FINLANDIA

Gerakan perempuan di Finlandia awalnya mulai muncul pada tahun 1884 dengan terbentuknya Asosiasi Perempuan Finlandia (*Finland's Association of Women/Suomen Naisyhdistys*). Setelah itu, gerakan-gerakan perempuan lainnya mulai bermunculan. Perjuangan gerakan perempuan di Finlandia bukanlah perjuangan yang mudah karena masih harus berperang melawan budaya patriarki yang masih mendominasi hampir di seluruh dunia.

Sebagai gerakan perempuan pertama, Asosiasi Perempuan Finlandia (*Finland's Association of Women/Suomen Naisyhdistys*) mempunyai fokus untuk meningkatkan status perempuan, baik itu dari aspek intelektual maupun moral, dan juga memperbaiki kondisi ekonomi dan juga posisi sosial perempuan di masyarakat. Hak politik juga merupakan salah satu hal penting yang dituntut oleh perempuan-perempuan ini. Kemunculan gerakan ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kemerdekaan negara Finlandia. (Jallinoja, *The Women's Liberation Movement in Finland*, 1980).

Selanjutnya, Liga Feminis Finlandia (*The League of Finnish Feminist/Unioni Naisialiitto*) atau yang sekarang bernama *The Feminist Association Unioni* merupakan organisasi perempuan non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1892. Fokus utama dari organisasi ini adalah mengenai hak politik, ekonomi, dan sosial untuk perempuan. Hal menarik dari Union ini adalah walaupun bergerak dibidang menyuarakan keadilan bagi perempuan, Union sendiri merupakan organisasi yang terbuka untuk perempuan dan laki-laki (Unioni, 2017).

Gerakan perempuan ketiga yang tidak kalah penting yaitu Organisasi Martha (*Martha Organization/Marttaliitto*). Gerakan ini berdiri pada tahun 1899 untuk mempromosikan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan. Tujuan dari Organisasi Martha adalah untuk melatih dan mendidik para ibu rumah tangga untuk meningkatkan kesadaran tentang kualitas kehidupan di kalangan keluarga Finlandia dan masyarakat miskin secara keseluruhan (Martat, 2017).

Keempat, *The Lotta Svard* merupakan gerakan perempuan sukarela yang lahir pada tahun 1921. Hadirnya *The Lotta Svard* bermaksud untuk meningkatkan kualitas para perempuan Finlandia. Perempuan Finlandia haruslah menjadi perempuan yang memiliki jiwa patriotisme, rela berkorban, berani, bertanggung jawab, dan juga terampil (Irja, 2013). Kegiatan perempuan di gerakan ini adalah membantu para laki-laki yang berjuang di medan perang, seperti salah satunya menjadi perawat. Sayangnya, ketika perang berakhir, Rusia meminta agar gerakan ini dibubarkan.

Ketertarikan untuk meningkatkan status perempuan semakin meningkat di Finlandia. Ketertarikan ini mencapai momentum pada tahun 1966 ketika sekelompok perempuan dari kalangan pelajar universitas mendirikan *The Group 9 (Yhdistys 9)* sebagai sebuah organisasi yang mempertanyakan keadilan untuk perempuan (Jallinoja, *The Movement For the Advancement of Women's Rights in Finland*, 1986). *The Group 9 (Yhdistys 9)* bekerja untuk mempromosikan reformasi gender dan juga menghilangkan peran gender yang sudah terlanjur terlekat di masyarakat.

Setelah perjuangan yang cukup panjang untuk menuntut keadilan gender, gerakan-gerakan perempuan di Finlandia kembali bekerja sama dan kemudian membentuk asosiasi baru yang diberi nama *Coalition of Finnish Women's Associations* (NYTKIS) pada tahun 1987. Koalisi ini dibentuk juga untuk memonitori pencapaian hak-hak perempuan dan juga bekerja untuk terus memperbaiki status perempuan demi memerangi ketidakadilan gender yang terus terjadi (Sulkunen, 2007).

MASALAH KETIDAKADILAN GENDER DI FINLANDIA

Seiring dengan perkembangannya, walaupun hak pilih sudah tercapai, dan laki-laki serta perempuan saling bekerja sama, ketidakadilan gender masih saja terjadi dan memperhatikan kaum perempuan Finlandia. Ketidakadilan gender yang terjadi inilah yang kemudian juga menjadikan gerakan-gerakan kaum perempuan di Finlandia yang tergabung dalam *Coalition of Finnish Women's Associations* (NYTKIS) untuk menuntut adanya kesetaraan.

Di bidang politik, perempuan Finlandia masih merasakan adanya ketidakadilan yang menghalangi mereka untuk aktif berpartisipasi. Proporsi perempuan yang duduk di posisi atas dalam pekerjaan masih terbilang sedikit. Selain itu, walaupun hak pilih sudah tercapai dan perempuan sudah terwakili di parlemen, kuota yang diberikan juga masih sedikit. Perempuan juga masih menemukan kesulitan untuk mendapatkan promosi karir di sektor swasta (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

Di bidang ekonomi, ketidakadilan yang besar di tempat kerja masih dirasakan antara perempuan dan laki-laki di Finlandia. Ketidakadilan ini ditunjukkan dari adanya perbedaan pendapatan berdasarkan jenis kelamin, pemisahan gender di tempat kerja dan jangka waktu tetap pekerjaan (*fixed-term employment*) yang merugikan kaum perempuan (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

Di bidang sosial, kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kekerasan yang paling berat yang terjadi di Finlandia. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 membuktikan bahwa sejak tujuh tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan tidak berkurang dari tahun 1998. Bersamaan dengan kekerasan terhadap perempuan, prostitusi, perdagangan manusia, dan stigma negatif (*stereotyping*) perempuan di media merupakan masalah yang sulit untuk dihilangkan dari Finlandia (The Coalition of Finnish Women's Associations, 2008).

Di bidang pendidikan, Finlandia memang dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Akan tetapi, semakin berkembangnya pendidikan tidak didasari dengan perimbangan dalam hal kurikulum, padahal pemahaman keadilan gender haruslah diajarkan sejak dini. Selain itu, jumlah perempuan yang menduduki bangku pendidikan di Finlandia juga pernah mengalami perbedaan, di mana laki-laki pernah mendominasi (Sahlberg, 2009).

Di bidang kesehatan, Kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak pernah menjadi masalah ketidakadilan gender di Finlandia di mana mereka yang tinggal dipertanian lebih mudah mendapatkan akses daripada mereka yang hidup dipedesaan. Ketidakadilan juga dirasakan ketika masyarakat kalangan kelas

atas dapat membayar pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat kalangan kelas bawah, terutama perempuan dan anak-anak (Saaritsa, 2015).

Ketidakadilan gender di Finlandia sudah muncul dan berlangsung sejak sebelum kemerdekaan hingga beberapa ketidakadilan masih berlangsung saat ini, terutama ketidakadilan yang juga dirasakan oleh kelompok minoritas di Finlandia, baik itu para imigran maupun mereka yang menderita disabilitas. Fakta-fakta munculnya ketidakadilan gender inilah yang kemudian di perjuangkan oleh gerakan-gerakan perempuan Finlandia untuk kemudian dijadikan tuntutan ke pemerintah demi melawan dan menghapus ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat.

TUNTUTAN GERAKAN-GERAKAN PEREMPUAN FINLANDIA

Gerakan-gerakan perempuan di Finlandia secara aktif menyuarakan permintaan-permintaan yang menuntut agar perempuan dapat menerima hak yang adil sebagai manusia. Di Finlandia, gerakan-gerakan perempuan di awal kemunculannya sepakat dengan menjadikan hak pilih perempuan “*women suffrage*” sebagai awal tuntutan mereka. Puncak mobilisasi dari gerakan-gerakan perempuan adalah saat demonstrasi besar-besaran pada bulan Oktober tahun 1905 (Sulkunen, 2007) dan kemudian menjadikan perempuan Finlandia sebagai perempuan pertama di Eropa yang mendapat hak pilih pertama di tahun 1906.

Selain itu, perjuangan gerakan-gerakan perempuan Finlandia ini juga didukung dengan adanya kerjasama gerakan-gerakan perempuan di Eropa. Dengan menggunakan media massa berupa koran, gerakan-gerakan perempuan ini saling terhubung untuk menyuarakan keadilan gender secara menyeluruh. Setelah hak pilih yang menjadi mayoritas tuntutan gerakan perempuan tercapai, gerakan-gerakan perempuan ini tetap saling bekerja sama menuntut keadilan yang belum tercapai di masing-masing negaranya.

Kerja sama gerakan-gerakan perempuan Eropa juga termasuk dengan tergabungnya mayoritas gerakan perempuan dalam *Transnational Advocacy Network* (TANs). Di wilayah Eropa, terdapat 5 TANs yang aktif dalam memperjuangkan keadilan gender. Jaringan transnasional perempuan Eropa ini

menghasilkan diskusi publik yang menjurus terhadap pentingnya strategi keadilan gender dan mempengaruhi keputusan politik untuk memasukkan *gender mainstreaming* sebagai agenda politik negara masing-masing (Lang, 2009).

Dalam menjalankan strategi untuk mempromosikan keadilan gender, Finlandia juga berkomitmen lewat keterlibatan dalam keputusan-keputusan internasional yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri, keputusan-keputusan tersebut diantaranya adalah a) *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979; b) *Beijing Declaration and Platform for Action* 1995; c) *Twenty Third United Nations General Assembly Special Session "Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for 21st Century"* 2000; dan d) *United Nations Millennium Declaration* 2000.

Selanjutnya, terpilihnya perempuan di parlemen juga semakin menjadikan suara-suara perempuan dapat didengar. Para perwakilan ini secara bertahap mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil gender, terlebih dengan masih aktifnya gerakan-gerakan perempuan menyuarakan keadilan gender yang belum tercapai di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kesungguhan pemerintah terhadap masalah ini terlihat dengan didirikannya badan khusus keadilan gender di tahun 1972.

Hal ini ditambah dengan Gerakan-gerakan perempuan terutama di bawah *Coalition of Finnish Women' Associations* (NYTKIS) yang terus melancarkan tuntutan-tuntutan selama mereka masih menemukan ketidakadilan gender di masyarakat. Tuntutan-tuntutan yang diberikan adalah diantaranya diajukan pada tahun 2000 dan 2008 ke pemerintah sebagai perwujudan implementasi *Beijing Platform for Action* (1995) dan hasil dari *Twenty-Third Special Session of the General Assembly* (2000).

IMPLIKASI KEBIJAKAN KEADILAN GENDER HASIL TUNTUTAN GERAKAN PEREMPUAN DI FINLANDIA

Finlandia tumbuh sebagai negara yang memperhatikan keadilan perempuan (*women-friendly*). Gerakan-gerakan perempuannya pun banyak berkontribusi demi membangun Finlandia sebagai negara yang adil gender.

Keterwakilan perempuan di parlemen turut serta mewakili suara perempuan sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang adil gender.

Salah satu bukti nyata dari komitmen Finlandia terhadap tuntutan kaum perempuan untuk mewujudkan keadilan gender adalah dengan mendirikan badan-badan khusus keadilan gender di bawah Kementerian Hubungan Sosial dan Kesehatan. Kementerian ini membawahi tiga badan yang masing-masing berdiri sendiri, pertama adalah *Gender Equality Unit*, kedua yaitu *Ombudsman for Equality*, dan yang ketiga adalah *Council of Equality*. Selain ketiga badan ini, terdapat pula *The Equality Board*. Keempat badan di atas merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mempromosikan keadilan gender di Finlandia.

Selain itu, usaha Finlandia untuk mewujudkan keadilan gender adalah dengan mengeluarkan *Act on Equality between Women and Men* pada tahun 1987 yang telah mengalami beberapa kali amandemen. *Act on Equality between Women and Men* mempunyai tiga tujuan utama, pertama adalah untuk mempromosikan keadilan antara perempuan dan laki-laki, kedua untuk mencegah adanya diskriminasi berdasarkan gender, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan status perempuan, terutama dalam kehidupan pekerjaan (Tavoittelemassa, 2006).

Dalam menanggapi usulan-usulan yang terus diserukan oleh gerakan perempuan, Finlandia lewat pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil gender, termasuk dengan membuat *Government Action Plan for Gender Equality* yang dikeluarkan secara berkala. Rencana aksi ini mengadopsi kebijakan-kebijakan adil gender dalam semua bidang.

Di bidang politik, dalam menanggapi masalah kuota perempuan, pemerintah lewat lewat *Act on Equality between Women and Men* yang mengalami amandemen pertama pada tahun 1995 menyatakan bahwa minimal kuota baik itu perempuan dan laki-laki yang duduk di badan pemerintahan atau badan resmi lainnya harus mencapai 40% kursi (Gender Equality Unit & The Ombudsman for Equality, 2005).

Di bidang ekonomi, demi menghilangkan perbedaan pembayaran berdasarkan gender yang masih terjadi terjadi di Finlandia, pemerintah

mengeluarkan kebijakan berupa “*Equal Pay Programme*” di tahun 2005. Pemerintah juga mulai mempromosikan adanya peningkatan “*full-time employment*” di mana dengan hal ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di tempat kerja (Ministry of Social Affairs and Health, Government Action Plan 2012-2015, 2012).

Sesuai dengan program pemerintah, karena ranah pekerjaan masih banyak di dominasi oleh laki-laki, maka pemerintah bekerja sama dengan pasar tenaga kerja akan membagi rata lapangan pekerjaan. Selain itu, rekonsiliasi kehidupan kerja dan keluarga serta penerapan rencana keadilan gender di tempat kerja merupakan bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pemberian cuti merawat anak yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan status perempuan di tempat kerja.

Di bidang sosial, pada tahun 2010, Pemerintah Finlandia mengeluarkan *Action Plan to Reduce Violence against Women* di mana berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terus berulang, pengurangan kekerasan seksual, dan perlindungan terhadap perempuan (Ministry of Social Affairs and Health, Government Report on Gender Equality, 2011). Pemerintah juga merevisi *National Plan of Action against Trafficking in Human Beings* dengan melarang adanya pembelian jasa seksual dari korban perdagangan. Pada tahun 2008, aturan *Council of Ethics* mengenai periklanan juga diperbarui dengan tidak menonjolkan perempuan di media (UNECE, Country Report by Finland, 2014).

Di bidang pendidikan, secara bertahap, perempuan di Finlandia diberikan hak untuk dapat bersekolah. Demi menjamin perempuan dan laki-laki untuk dapat peduli dan sadar akan keadilan gender, pemerintah mengeluarkan kurikulum yang mengajarkan pendidikan keadilan gender di mulai sejak pendidikan anak usia dini, pendidikan anak pra-sekolah, dan pendidikan tinggi dan penelitian (UNECE, Country Report by Finland, 2014).

Di bidang kesehatan, demi mengatasi ketidakadilan akses kesehatan yang tidak menyeluruh, terutama bagi perempuan dan anak-anak, pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan beberapa program kesehatan, diantaranya *Health for*

All Program (1993), *Health 2015 Public Health Program* (2001), *National Action Plan to Reduce Health Inequalities 2008–2011*, dan *Program for Health Promotion 2007–2011* (Saaritsa, 2015). Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kesadaran kesehatan dan hak seksual dan reproduksi bagi anak-anak lewat kampanye *My body, I decide* di Finlandia.

Bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas, pemerintah juga aktif mengeluarkan kebijakan yang adil, seperti dengan mengeluarkan *Government Integration Programme for 2012-2015* di mana salah satu isinya adalah untuk menargetkan pekerjaan bagi para imigran. Pemerintah juga menerbitkan *eHandbook on Disability Services* berisi informasi dan dukungan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja walaupun mereka berada dalam kondisi yang berbeda.

Pendidikan di Finlandia juga sudah melibatkan kemajuan pendidikan bagi para imigran. Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan program “*Let’s Read Together*” untuk meningkatkan kemampuan membaca dan juga belajar bahasa Finlandia. Selain itu, terdapat pula jaringan yang bernama *Auroras* yang bertujuan untuk memperdalam kemampuan imigran tentang Finlandia.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan, keberhasilan Finlandia untuk menjadi salah satu negara terbaik dalam mewujudkan keadilan gender tidak akan terlepas dari peran yang dijalankan oleh gerakan-gerakan perempuan yang ada di dalam negara tersebut dalam menuntut ketidakadilan dalam negeri.

KESIMPULAN

Finlandia merupakan negara pertama di Eropa yang memberikan hak untuk memilih dan dipilih kepada warga negara perempuannya di pemilihan umum pada tahun 1907. Keberhasilan perempuan untuk memperoleh hak ini tidak lepas dari perjuangan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan perempuannya. Setelah mendapatkan hak pilih, perjuangan gerakan perempuan dilanjutkan untuk mendapatkan hak lainnya seperti hak ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Advokasi yang dilakukan kaum perempuan Finlandia adalah dengan mendirikan gerakan-gerakan perempuan yang kemudian berkoalisi menjadi satu menuntut berbagai masalah ketidakadilan yang terjadi di berbagai bidang di Finlandia. Perjuangan gerakan perempuan ini juga didukung dengan kerja sama yang dilakukan dengan gerakan-gerakan perempuan di Eropa. Advokasi gerakan-gerakan perempuan berupa tuntutan kemudian diajukan ke pemerintah.

Dalam rangka komitmen pemerintah terhadap perwujudan keadilan gender di negaranya dan dalam menanggapi tuntutan yang diberikan oleh gerakan perempuan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang berupa *Act on Equality between Women and Men*, membuat badan khusus keadilan gender, menerbitkan *Government Action Plan for Gender Equality* secara berkala, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang mengatasi ketidakadilan gender di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2015, November 19). *How equal are you?* Retrieved March 26, 2016, from BBC: <http://www.bbc.com/news/world-34808717>
- Gender Equality Unit, & The Ombudsman for Equality. (2005). *The Act on Equality between Women and Men 2005*. Helsinki: Gender Equality Publications.
- Haines, G. (2016, November 3). *Mapped: The Best and The Worst Countries for Gender Equality*. Retrieved March 17, 2017, from Telegraph.co.uk: <http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/mapped-the-best-and-worst-countries-for-gender-equality/>
- Hannele Kurki, Kuusi, H., & Vänskä, H. (2001). *Woman and Science: Review of The Situation in Finland. Finnish National Report*, 1.
- Lang, S. (2009). *Assessing Advocacy: European Transnational Women's Network and Gender Mainstreaming*. *Social Politics International Studies in Gender State & Society* Volume 16 Issue 3, 327-357.

- Ministry of Social Affairs and Health. (2011). *Government Report on Gender Equality*. Helsinki: Gender Equality Publications.
- Ministry of Social Affairs and Health. (2012). *Government Action Plan 2012-2015*. Helsinki: Gender Equality Publications.
- Pietila, H. (2006). The Progress of Women in Finland. In *Global Feminism, Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights*. New York: New York University Press.
- Saaritsa, S. (2015). Children first: Intrahousehold Responses to Health Care Inequality in Pre-Welfare State Finland. *11th European Historical Economics Society Conference 2015*, 1-34.
- Sahlberg, P. (2009). A Short History of Educational Reform in Finland. *Journal of Education Policy*, 1-38.
- Sinkkonen, N. (2007). *Centenary of Women's Full Political Rights in Finland*. Retrieved February 27, 2017, from The history of NYTKIS, the Coalition of Finnish Women's Associations:
http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/aanioikeus/en/articles/nytkis_en.htm
- Sulkunen, I. (2007). Suffrage, gender and citizenship in Finland. *NORDEUROPA*, 29-34.
- Tavoittelemassa, T.-a. (2006). *Striving for Gender Equality*. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.
- The Coalition of Finnish Women's Associations. (2008). *Submission to the United Nation's Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Helsinki.
- UNECE. (2014). *Country Report by Finland*. Helsinki: UNECE Publications.